FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAMPUNG TIMI DISTRIK WEREKA KABUPATEN LANNY JAYA

SKRIPSI

Díajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Guna Mencapai Gelar Sarjana S.IP Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

TERLIN GIRE NIM. 2018 10 088

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM) YAPIS WAMENA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK 2022

HALAMAN PERSETUJUAN

FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAMPUNG TIMI DISTRIK WEREKA KABUPATEN LANNY JAYA

Identitas Penulis,

NAMA : **TERLIN GIRE**

NIM : 2018 10 088

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal: 25 Juli 2022

Pembimbing I

<u>Dr. H. RUDIHARTONO ISMAIL.,M.Pd</u> NIP. 19700408 199702 1 002 NIDN

TUKIJAN,S.Sos.,M.Si NIDN. 1427016601

Pembimbing II

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

<u>SAHRAIL ROBO, S.Sos.,M.I.P</u> NIDN. 1425108601

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAMPUNG TIMI DISTRIK WEREKA KABUPATEN LANNY JAYA

Telah Dipertahankan Skripsi ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi Pada Hari **Selasa** Tanggal **2 Agustus 2022**

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua, Sekretaris,

<u>Dr. H. RUDIHARTONO ISMAIL.,M.Pd</u> NIP. 19700408 199702 1 002

<u>TUKIJAN,S.Sos.,M.Si</u> NIDN. 1427016601

Anggota, Anggota,

SOLTAN TAKDIR, S.T.,M.Si NIDN. 1214018301 Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si NIDN. 1207086701

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena,

<u>Dra. TELLY NANCY SILOOY, M.Si</u> NIDN. 1207086701

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana karena adanya dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa materi, moril maupun spiritual yang tak terhingga. Untuk itu sebagai ungkapan syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan hormat kepada:

- 1. Bapak **Dr**. **H. Rudihartono Ismail,M.Pd** selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi.
- 2. Ibu **Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 3. Bapak **Sahrsail Robo, S.Sos.,M.I.P** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- 4. Bapak **Dr**. **H. Rudihartono Ismail, M.Pd**, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Tukijan, S.Sos, M.Si**, selaku Dosen Pembimbing II yang walaupun dalam kesibukannya dengan sepenuh hati selalu memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama menekuni studi.
- 6. Bapak **Tuwe Penggu** selaku Kepala Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya, Aparat Kampung dan seluruh masyaratat yang

telah memberikan ijin, rekomendasi, bantuan kepada penulis, sehingga penulis tidak menemui kesulitan.

- 7. Ayahanda Doleki Gire dan Ibunda Nerkenda Penggu yang tercinta , yang telah membesarkan dan memberikan doa dan restu, serta Kakakku Telinde Gire yang selalu mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan
- 8. Seluruh rekan rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Tahun Akademik 2018/2019 atas kebersamaannya selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
- 9. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaiaan skripsi ini.

Atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini. Semoga semua amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat dihati pembaca.

Wamena,	• • • •	•		٠.		 •		•	
Рe	n u	1	i	S					

Terlin Gire NIM. 2018 10 088

ABSTRAKSI

Terlin Gire ______ "Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya". (Dosen Pembimbing I: H. Rudihartono Ismail dan Dosen Pembimbing II: Tukijan).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimanakah fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya. Penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel yaitu fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa dengan Indikator: waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan dan cara pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan, populasi dalam penelitian ini sebanyak 13 Orang. Dalam penarikan sampel, penulis menggunakan teknik sampling Jenuh. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan sebanyak 13 orang. Teknik. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan studi literatur. teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisa skor.

Hasil analisa data menunjukan bahwa rata-rata skor dari indikator **Waktu Pengawasan** adalah 33,33 termasuk dalam predikat setuju, rata-rata skor indikator **Objek Pengawasan** adalah 33 termasuk dalam predikat setuju, rata-rata skor indikator **Subjek Pengawasan** adalah 30 termasuk dalam predikat setuju dan rata-rata skor indikator **Cara Mengumpulkan Fakta-fakta** adalah 33,75 termasuk dalam predikat setuju.

Rata-rata skor hasil rekapitulasi dari keempat indikator pengukuran yang digunakan adalah 32,52 termasuk dalam predikat **Setuju**. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Di Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Jayawijaya berdasarkan keempat indikator pengukuran dapat dikategorikan telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pengawasan, Alokasi Dana Desa

DAFTAR ISI

				Halaman
HALAMA	AN JU	DUL		i
HALAMA	AN PE	RSE'	TUJUAN	ii
HALAMA	AN PE	NGE	SAHAN	iii
KATA PE	ENGA	NTA	R	iv
ABSTRA	KSI	•••••		vi
DAFTAR	ISI	•••••		vii
DAFTAR	TABI	EL		ix
DAFTAR	GAM	BAR		xiii
DAFTAR	LAM	PIRA	AN	xiv
BAB I.	PE	NDA]	HULUAN	1
	A.	Lat	ar Belakang	1
	B.	Bat	asan Masalah	4
	C.	Rui	musan Masalah	4
	D.	Tuj	uan dan Kegunaan Penelitian	5
		1.	Tujuan Penelitian	5
		2.	Kegunaan Penelitian	5
BAB II.	LA	NDA	SAN TEORI	6
	A.	Kaj	ian Teori	6
		1.	Pengertian Pengawasan	6
		2.	Prinsip-prinsip pengawasan	7
		3.	Fungsi Pengawasan	9
		4.	Cara melakukan pengawasan	10
		5.	Badan Musyawarah Kampung	11
		6.	Pengertian pengelolaan	13
		7.	pengertian Dana	15
		8.	Pengertian Desa/Kampung	16

		9. Alokasi dana desa/kampung	17
		10. Efektivitas pengelokasian dana desa/kampung	19
		11. Peraturan pengelolaan dana desa/kampung	21
	B.	Penelitian Terdahulu	22
	C.	Definisi Operasional	24
	D.	Kerangka Konseptual Penelitian	25
BAB III.	ME	TODE DAN TEKNIK PENELITIAN	26
	A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	26
	B.	Jenis Penelitian	26
	C.	Populasi dan Sampel	26
	D.	Instrumen Penelitian	27
	E.	Teknik Pengumpulan Data	28
	F.	Teknik Analisa Data	29
BAB IV.	HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A.	Hasil Penelitian	30
	B.	Analisa Data	38
	C.	Pembahasan	51
BAB V.	PE	NUTUP	61
	A.	Kesimpulan	61
	B.	Saran – Saran	62
DAFTAR	PUST	TAKA	63
LAMPIRA	N – 1	LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Pendapatan Alokasi Dana Desa Kampung Timi	2
Tabel 3.1	Tabel Interpretasi Nilai Skor	29
Tabel 4.1	Keadaan Responden Menurut Jenis Kelamin	35
Tabel 4.2	Keadaan Responden Menurut Umur	36
Tabel 4.3	Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4.4	Keadaan Responden Menurut Pekerjaan	37
Tabel 4.5	Keadaan Responden Menurut Masa Kerja	37
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan secara langsung pada	
	pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung	39
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Tentang Badan Musyawarah	37
	Kampung melakukan pemantauan tidak secara langsung	
	melalui laporan dari pemerintah Kampung yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana	
	Kampung	40
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Tentang Adanya pemeriksaan	
	secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana	41
T-1-1 4 0	Kampung oleh Badan Musyawarah Kampung	41
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Tentang Anggota Badan	
	Musyawarah Kampung melakukan cross check antara	
	hasil laporan dengan pengamatan langsung ke objek	42
Tabal 4 10	pelaksana kegiatan	42
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Tentang Badan Musyawarah	
	Kampung melakukan wawancara dengan Pemerintah	12
Tabel 4.11	Kampung mengenai pengelolaan Dana Kampung Tanggapan Responden Tentang Badan Musyawarah	43
1 4061 4.11	Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan	
	Dana Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai	
	dengan kebutuhan masyarakat	43
Tabel / 12	Tanggapan Responden Tentang Adanya pemberian	43
1 4001 4.12	laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung	
	dari pemerintah Kampung kepada Badan Musyawarah	
	Kampung	45
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Tentang Anggota Badan	73
14001 4.13	Musyawarah Kampung mempunyai kecermatan dalam	
	mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana	
	Kampung	45
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Tentang Anggota Badan	
	Musyawarah Kampung mengamati Dana Kampung dari	
	hasil kegiatan yang dilakukan	46

Tabel 4.15	Tanggapan Responden Tentang Dengan adanya				
	pengawasan yang dilakukan BMK membuat kinerja				
	Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal	47			
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Tentang Badan Musyawarah				
	Kampung memberikan analisis terhadap kebenaran atau				
	kekeliruan dalam laporanpelaksanaan pengelolaan Dana				
	Kampung	48			
Tabel 4.17	Tanggapan Responden Tentang Adanya analisis terhadap				
	semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana				
	Kampung	49			
Tabel 4.18	Tanggapan Responden Tentang Badan Musyawarah				
	Kampung menyampaikan perhitungan waktu yang harus				
	ditempuh dalam pengelolaan Dana Kampung kepada				
	Pemerintah Kampung	49			
Tabel 4.19	Tanggapan Responden Tentang Badan Musyawarah				
	Kampung melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya				
	yang digunakan dalam pengelolaan Dana Kampung	50			
Tabel 4.20	Rata-Rata Skor Indikator Waktu Pengawsan	52			
Tabel 4.21	Rata-Rata Skor Indikator Objek Pengawsan	54			
Tabel 4.22	Rata-Rata Skor Indikator Subjek Pengawsan	56			
Tabel 4.23	Rata-Rata Skor Indikator Cara Mengumpulkan Fakta-				
	Fakta	58			
Tabel 4.23	Rekapitulasi Indikator Dari Variabel Fumgsi Pengawasan				
	Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam				
	Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Di Kampung Timi				
	Distrik Wareka	59			

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	25
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Kampung	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2. Data Hasil Penelitian

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Objek Penelitian

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Bio Data Penulis

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan (Controlling) merupakan fungsi dan tanggung jawab setiap pemimpin organisasi, kegiatan pengawasan seharusnya menghendaki adanya terlebih dahulu rencana yang disusun dan ditetapkan. Seorang pemimpin hanya dapat melaksanakan pengawasan jika rangkaian tindakan organisasi didasarkan atas rencana yang ditetapkan sebelumnya, selain itu pengawasan adalah masa depan organisasi, artinya dengan adanya pengawasan yang terarah dalam pengelolaan alokasi dana desa/kampung akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan bila di temukan, sehingga dengan diadakannya pengawasan diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa/kampung tidak terjadi dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberikannya kewenangan kepada desa/kampung untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa/kampung, maka desa/kampug sepatutnya memiliki hak untuk mendapat pembiayaan berupa anggaran khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atas, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c tentang desa yang mengamanatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, dibagikan kepada desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah nomor. 72 tahun 2005 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Kampung Timi Distrik Wareka pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.096.637.994 yang diperuntukkan penyelenggaraan pemerintahan, pembanguanan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya tak terduga dengan rincian seperti pada table berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya

No	Tahun	Jumlah				
2	2018	Rp. 650.821.000,-				
3	2019	Rp. 820.572.000,-				
4	2020	Rp. 960.110.000,-				
5	2021	Rp. 1.096.637.994,-				

Sumber Data: Kantor Kampung Timi, 2022

Dengan melihat hal tersebut anggaran yang diberikan kepada Kampung Timi mengalami peningkatan dari tahun ketahun, diharapkan Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya beserta elemen mampu untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan peruntukkannya.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh PemerintahKabupaten/ Kota untuk desa/kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa/kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BMK), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa/Kampung.

Badan Musyawarah Kampung (BMK) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah Kampung yang dibentuk berdasarkan wujud dari pelaksanaan demokratis di Kampung. Badan Musyawarah Kampung (BMK) berperan sebagai lembaga yangmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa/kampung dan peraturan Kepala Kampung diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana tugas dan tanggung jawab Badan Musyawarah Kampung (BMK) yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memberikan saransaran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Kampung, dalam rangka menyukseskan keberhasilan Alokasi Dan Desa (ADD).

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya, Badan Musyawarah Kampung (BMK) selama ini bertugas sebagai pengawas dari setiap program kerja yang telah ditetapkan dalam RKPDes Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya, baik dalam Pembangunan Fisik, Sosial Budaya, dan Ekonomi serta mengesahkan RPJMDES dan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Kampung. Pengesahan Peraturan Desa tentang APBDes maka BMK ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ADD dan berperan sebagai pengawas.

Badan Musyawarah Kampung (BMK) di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi BMK Timi juga menyelenggarakan musyawarah Kampung antara BMK, Pemerintah Kampung, dan masyarakat dalam menentukan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul "Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya dengan aspek yang diteliti yaitu waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan dan cara pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimanakah fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya?".

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan (Sugiyono, 2009:326) dengan demikian dicapainya tujuan di atas, diharapkan dapat berguna sebagai :

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena dalam kajian teori tentang pengawasan

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada Kantor Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Lanny Jaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian teori

1. Pengertian Pengawasan

Dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu ada pengawasan tersebut serta tujuan yang dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri. Kegiatan pengawasan adalah suatu hal yang sangat esensial dalam suatu organisasi atau instansi dan tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengawasan menyangkut kegiatan seluruh organisasi sehingga sangat menentukan bagi pencapaian tujuan.

Definisi pengawasan menurut Nannan (2001:153) adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah legal entity yang mandiri, bukan hubungan internal dengan entitas yang sama. Menurut Handoko (2003:359) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan- tujuan organisasi dan menjamin tercapai pengawasan merupakan elemen tugas- tugas manajerial dan mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, melalui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan. Menurut Harahap (2001:10) menyataan bahwa secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara mulus tanpa penyimpangan- penyimpangan yang berarti.

Menurut Manullang (2002:173) pengawasan diartikan sebagai suatu proses untu mengharapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Hasibuan (2001:25) pengawasan adalah pemeriksaan apakah semua itu terjadi sesuai rencana yang ditentukan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya menurutnya terdiri dari tiga tahap:

- 1. Menetapkan standar pelaksanaan,
- 2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar
- 3. Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

Pengawasan menurut Siagian (2004:125) adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan suatu hal yang esensial dalam organisasi yang tidak dapat diabaikan serta tugas dan tanggung jawab, pemimpin untuk melakukan penelitian atau pengkajian ulang terhadap usaha ataupun organisasi.

Menurut **Guntur**, (2005:89) mengemukakan bahwa "Pengawasan adalah sebagaikeseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur apayang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma dan standar".

Menurut Hasley (2003:8) pengawasan adalah memilih orang yang tepat untuk pekerjaan; menimbulkannya minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang dan mengerjakan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya; mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapatkan keyakinan apakah pelajaran itu telah dipahami dengan wajar; mengadakan koreksi-koreksi bila perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak dapat bekerja dengan baik; memuji bila ia selayaknya mendapatkan pujian dan member penghargaan atas kerja yang baik; dan akhirnya menyelaraskan setiap orang ke dalam suasana kerja sama yang erat dengan teman-teman sekerjaanya. Semuanya itu dilakukan secaraadil, sabar, dan tekun sehingga setiap orang akan menjalankan pekerjaannya dengan mahir, teliti, cerdas bersemangat dan sempurna.

Menurut Manullang (1996:127), Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memeperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu condition sine qua non bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu

dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan.

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan (Manullang,1996:131) yakni :

a. Waktu pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macammacam pengawasan itu dibedakan atas :

 Pengawasan preventif, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*.
 Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari.

Sasaran pengawasan ini adalah Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah untuk meneliti apakah peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah bertentangan perundangundangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum atau urusan yang bersangkutan dalam perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada pokoknya peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah ada yang memerlukan pengesahan dari yang berwewenang untuk berlakunya yaitu mengenai:

- a.menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat dan ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan keharuasan untuk berbuat sesuatu dan lain-lain yang di tunjukan langsung kepada rakyat
- b. mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah
- c. memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah.

- 2) Pengawasan repressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.
 - Pengawasan repressif berwujud penangguhan atau pembatalan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tingkatannya. Secara lengkap dikutip pasal 70 Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pengawasan repressif meliputi:
 - a. Peraturan daerah atau Kepitisan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perndang-undangan
 - b. Apakah gubernur Kepala Daerah tidak menjalankan haknya untuk menangguhkan atau membatalkan Peraturan Daerah Tingkat II sesuai yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka penangguhan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Mendagri
 - c. Pembatalan dan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini karena beretentangan dengan kepentingan peraturan perundang-undangan mengakibkan batalnya semua akibat dari Peraturan Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah yang dimaksud sepanjang masih dapat dibatalkan.

b. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasandi bidang-bidangsebagai berikut: (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu, dan (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun

terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya, pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannyabertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manuals.

c. Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas:

1) Pengawasan intern

Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh ini karena itu. pengawasan semacam disebut juga pengawasanvertikal atauformal. Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwewenang.

2) Pengawasan ekstern.

Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (social control) atau pengawasan informal.

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:

1) Personal Observation (Personal Inspection)

Peninjauan pribadi (personal inspection, personal observation) adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

2) *Oral Report* (Laporan Lisan)

Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui-laporan lisan yang diberikan bawahan.

3) Written Report (Laporan Tertulis)

Laporan tertulis (*written report*) merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas yang diberikan atasannya kepadanya.

4) Control by Exception.

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian adalah suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

2. Prinsip- Prinsip Pengawasan

- 1) Menurut Simbolon (2004:69)
 - a) Pengawasan harus berorientasi pada tujuan organisasi.
 - b) Pengawasan menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
 - c) Pengawasan harus terus menerus.
 - d) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feed back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijasanaan waktu yang akan datang.
 - e) Pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif.
 - f) Pengawasan harus jujur mendahulukan pada kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

- g) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
- 2) Menurut Manullang (2002:175) ada 2 prinsip pengawasan yaitu :
 - a) Adanya perencanaan tertentu
 - Rencana yaitu merupakan suatu keharusan bagi suatu manajer untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan menetapkan metode- metode atau cara yang digunakan serta menentukan standar kerja sebagai pedoman untuk mencapai tujuan instansi. Pengawasan tanpa adanya perencanaan tidak akan bisa dilaksanakan dan sebaliknya perencanaan dalam pelaksanaan kerja tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan tanpa adanya pengawasan.
 - b) Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan Wewenang dan instruksi harus diberikan kepada bawahan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan dan dimana dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya dengan pihak- pihak lain didalam instansi dan sejauh mana mereka dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepada mereka dengan baik.
- 3) Menurut Siagian (2004:176) Pengawasan akan berjalan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut :
 - a) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
 - b) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
 - c) Pengawasan harus menujukkan pengecualian pada titik- titik strategi tertentu.
 - d) Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
 - e) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
 - f) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.

- g) Efisiensi pelaksanaan pengawasan.
- h) Pengawasan harus bersifat membimbing.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip- prinsip pengawasan antara lain : adanya rencana tertentu dalam pengawasan dapat segera dilaporkan adanya bentuk penyimpangan, pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis, pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Suprihanto (2003:102) Berbagai fungsi pokok pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahankesalahan, artinya bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan, ataupun penyelewengan.
- 2) Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi artinya dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara- cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan.
- 3) Untuk mengatur organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya, yakni dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan.
- 4) Untuk mempertebal rasa tanggung jawab, memperhatikan nomor 1 s/d 3 diatas adanya pengawasan yang rutin mengakibatkan setiap bagian berikut pengawasan akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dilakukan, sehingga tidak akan muncul tindakan saling menyalahkan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Harahap (2001:35) Adapun fungsi pengawasan pada dasarnya mencaup empat unsur berikut yaitu :

- a) Penetapan standar pelaksanaan
- b) Penetapan ukuran ukuran pelaksanaan

- c) Pengukuran pelaksana nyata dan membandingan dengan standar yang telah ditetapkan.
- d) Mengambil tindakan koreksi ulang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Berdasarkkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa, fungsi pengawasan adalah sebagai pengarahan supaya jangan sampai terjadi kekeliruan dan sesuai dengan rencana.

4. Cara Melakukan Pengawasan

- 1) Cara melakukan pengawasan menurut Simbolon (2004:74) yaitu :
 - a) Melakukan infeksi dalam pelaksanaan pengawasan.
 - b) Menelaah laporan-laporan yang masuk.
 - c) Melakuan pemantauan terhadap pelaksanaan tingkat lanjut hasiL pemeriksaan.
 - d) Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tingkat lanjut hasil pemeriksaan.
 - e) Menelaah saran, usul, kritik atau koreksi yang masuk.
 - f) Melakukan rapat koordinasi.
 - g) Mengamati dengan memantau pelaksanaan tugas bawahan.

Disisi lain terlihat bahwa pengawasan dilaksanakan sebagai sarana untuk menciptakan kedisiplinan, ketertiban kebenaran bertindak dan menghilangkan keborosan. Pengawasan tidak bermaksud mencari-cari kesalahan semata-mata, tetapi untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian fungsi pengawasan akan berperan dalam menyelamatkan kerja dari suatu organisasi yang memungkinkan persiapan pencapaian tujuan ditempuh secara efektif dan efisien.

5. Badan Musyawara Kampung (BMK)

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Musyawarah Kampung (BMK) yang sebelumnya disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Musyawarah Kampung merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Kampung yang turut membahas dan meyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat kampung, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Kampung.

Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Musyawarah Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kampung untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Hasil musyawarah kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Kampung.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Menampung dan menyaluran aspirasi masyarakat desa, dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dan didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 tentang Hak Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

- Menyataan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Serta UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 63 tentang Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
 - Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b) Melaksanakan kehidupan Demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- d) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa dan
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Susunan Pemerintahan Kampung terdiri atas Pemerintah Desa/Kampung (Pemdes) dan Badan Musyawarah Kampung (BMK). Pemerintah Desa/Kampung dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kampung. Badan Musyawarah Kampung adalah badan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat - istiadat, membuat peraturan desa (Perdes),

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pimpinan BMK dipilih dari dan oleh anggota BMK. Masa jabatan anggota BMK adalah 6 tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BMK diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

6. Pengertian Pengelolaan.

Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993:55). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah (2004:87) berpendapat bahwa daiam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing) pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendahkan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara etektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang tetah ditetapkan. Stoner menekanan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu,

apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan system pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qatyubi, 2007:92).

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap datam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak datam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan diperlukan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

7. Pengertian Dana

Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dana atau kas adalah merupakan bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi. Karena sifat liquidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Jika organisasi menyimpan kas uang, dana dalam bentuk rekening giro maka jasa giro yang diterima oleh organisasi prosentasenya akan tebih rendah dari pada jika disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Adapun motof dalam memiliki dana menurut Jhon Maynad Keynes (2003: 17 7) ada tiga motif, yaitu antara lain:

- a. Motif transaksi, yaitu motif yang dilakukan organisasi dalam upaya menyediakan dana untuk membayar berbagai transaksi;
- b. Motif berjaga-jaga, yaitu motif yang dilakukan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua pengeluaran dan pemasukan dana bisa diprediksikan dengan sangat akurat, maka saldo kas untuk bermaksud jaga-jaga sangat rendah.
- c. Motif spekulasi, yaitu dimaksudnya untuk memperoleh keuangan dari memiliki dan menginvestasikan dana dalam bentuk investasi yang sangat liquid.

Lebih lanjut menurut Jhon Maynad Keynes (2003: 178) dana juga merupakan istilah keuangan yang umum di dalam perusahaan yang merupakan area fungsi bisnis yang Bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelolahnya dan menentukan alternatif penggunaan terbaik.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dana yang dimaksud dalam penulisan ini adalah dana pada motif transaksi yaitu pemerintah kampung menyediakan dana untuk menyediakan pelayanan publik di bidang pembangunan, pembinaan masyarakat kampung dan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik dari pelayanan jasa maupun pelayanan fisik.

8. Pengertian Desa/Kampung

Pengertian Desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 temang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bintarto (1983), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. UU Nomor 23 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Desa menurut Widjaja (2003:85) dalam bukunya "Otonomi Desa"menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai keanekaragaman, partisipasi, Kampung adalah otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Winardi (1988:72) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggat di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia. Dengan demikian Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui

otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Untuk Provinsi Papua, dengan diberlakukannya Otonomi Khusus, maka nama desa diganti dengan kampung, demikian halnya dengan nama kecamatan diganti dengan distrik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

9. Alokasi Dana Desa/Kampung.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah pengelolaan ADD merupakan suatu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaanggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Maksud Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung.

4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Kampung yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai Tujuan semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan Kampung). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap Kampung akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan Kampungnya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan Kampung yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1) Kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan Kampung (diproksikan ke jarak Kampung ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas wilayah, dan
- 7) Potensi Kampung (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Kampung per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Datam Negeri No 140/640/SJ, tanggai 22 Maret 2007 perihal "Pedoman Alokasi Dana Kampung dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kampung" memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Kampung. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian yang sama untuk setiap Kampung, atau Alokasi Dana Kampung Minimal, sedangkan asas adil untuk setiap Kampung berdasarkan nilai bobot Kampung yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan,

Kesehatan, dan lain lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Kampung Proporsional.

Dasar pemberian Alokasi Dana Kampung adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kampung, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Kampung, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 42 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Kampung dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kampung.

10. Efektivitas Pengalokasian Dana Desa/Kampung

Menurut Osborne dan Gaebler (1997:67), efektivitas adalah ukuran kualitas on/pnf itu. Ketika mengukur efisiensi, hams diketahui berapa banyak biaya yang hams ditanggung untuk mencapai suatu OM/pMf tertenti. Kctika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Efektivitas mempakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja. Menurut Nick Devas (1989:98), prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang mengalami perubahan paradigma seiring dengan pencanangan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1) Transparansi

Adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah, sehingga publik dan DP H D dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan daerah atau APBD.

2) Efisien.

Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin, guna menghasilkan output yang memadai.

Penghematan anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Dengan kata lain, standar pelayanan minimal merupakan target yang harus dicapai sesuai proporsi biaya yang ditetapkan.

3) Efektif

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran hamslah tepat sasaran. Selama ini Pemda sering tidak mempedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi hasil atau output.

4) Angkutabilitas

Dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut adanya pertanggungjawaban kepada publik yang dapat dilakukan secara institusional kepada DPRD. DPRD yang akan menilai apakah kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerah atau APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur sesuai apa yang direncanakan semula.

5) Partisipatif

Peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijamin. Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah (APBD) juga harus mengakomodasikan aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung.

11. Peraturan Pengelolaan Dana Kampung.

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kampung. termasuk dalam pengelolaan dana kampung, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016, dijelaskan bahwa pengelolaan dana kampung diperuntukkan dalam empat bidang Pemerintahan 10 vaitu Bidang persen, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 10 persen, Bidang Pembangunan 50 persen, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 30 persen. Selain dana ADD disiapkan oleh Pemerintah Pusat dari dana APBN, yang PemerintahDaerah wajib menyediakan dana shering sebesar 10 persen serta dana Bagi Hasil Pajak.

Dana untilk bidang pemerintahan digunakan untuk membayat honor dan tunjangan aparat kampung, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), Perlengkapan kantor dan kegiatan yang menunjang operasional aparat kampung. Dana untuk bidang pembangunan dikhususkan untuk pembangunan fisik rumah masyarakat, pustu. jalan, jembatan, dan. bangunan fisik lainnya. Dana bidang pembinaan kemasyarakatan dikhususkan untuk pembinaan pemuda melalui karang taruna, pembinaan ibu-ibu PKK, pemberian tainbahan makanan sehat untuk anak-anak sekolah Sedangkan dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat kampung digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas, perdagangan dan usaha lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Reverensi
1	Alpius Abeng	Fungsi Pengawasan	Berdasarkan hasil	Governance,
	Joko Triyono,	Badan	penelitian, yang menjadi	Jurnal S1Ilmu
	Rulida	Permusyawaratan	hambatan Badan	Pemerintahan
	Yuniarsih.	Desa Terhadap	Permusyawaratan Desa	http://jurmafis.unt
		Pengelolaan	dalam mengawasi anggaran	an.ac.id ;
		Alokasi Dana Desa	Alokasi Dana Desa di Desa	http://jurnalmhsfis
		Didesa Empakan	Empakan adalah kurangnya	ipuntan.co.nr
		Kecamatan Kayan	keterbukaan yang	
		Hulu	dilakukan oleh aparatur	
		Kabupaten Sintang	desa dalam merencanakan	
			dan melaksanakan program	

			desa, ketakutan dari	
			aparatur desa dalam	
			penyelenggaraan anggaran	
			Alokasi Dana Desa yang	
			harus diikutsertakan dengan	
			pengawasan Badan	
			Permusyawaratan Desa	
			serta kurangnya	
			komunikasi yang dilakukan	
			oleh Badan	
			Permusyawaratan Desa	
			dengan Aparatur desa	
			sehingga jarang sekali	
			melakukan diskusi dan	
			musyawarah bersama	
			dengan aparatur desa serta	
			masyarakat. Perangkat desa	
			terutama Kepala Desa dan	
			Sekretaris Desa jarang	
			sekali berada di Desa	
			Empakan karena tempat	
			tinggal dan rumah berada di	
			luar desa sehingga	
			komunikasi dan diskusi	
			tentang masalah desa jarang sekali dilaksanakan.	
2	I Komang	Efektivitas	Hasil penelitian ini	Jurnal
2	_	Liekuvitas	masii penenuan iii	Julilai
	Gerdion Ananda	Pangawasan Radan	menunjukkan hahwa	Interpretaci
	Gerdion Ananda Junior J Ketut	Pengawasan Badan Permusyawaratan	menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan	Interpretasi Hukum JISSN:
	Junior, I Ketut	Permusyawaratan	Pelaksanaan pengawasan	Hukum ISSN:
	Junior, I Ketut Kasta Arya	Permusyawaratan Desa (Bpd)	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan	Hukum ISSN: 2746-5047
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap	Pelaksanaan pengawasan	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 –
	Junior, I Ketut Kasta Arya	Permusyawaratan Desa (Bpd)	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh	Hukum ISSN: 2746-5047
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal,	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal,	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan,	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan, dll. Hal ini dipengaruhi	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan, dll. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan, dll. Hal ini dipengaruhi	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,
	Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Wayan	Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten	Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain diarahkan untuk mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh antara lain belum sepenuhnya berjalan baik, walaupun anggaran pendapatan belanja desa sangat penting seperti kegiatan pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan untuk saluran irigasi, jalan, dll. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya	Hukum ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021,

3	Zenni riana,	Efektivitas	Hasil penelitian	Jurnal Riset
	Lulu Nada	Pengelolaan	menunjukkan bahwa	Akuntansi
	Lubis	Alokasi Dana	efektivitas pengelolaan	Multiparadigma
		Desa Pada Desa	alokasi dana desa di	(JRAM) Vol.6,
		Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	No.2, Desember
		, Kecamatan	Village, TanjungMorawa	2019
		Tanjung Morawa,	A District, tingkat	
		Kabupaten Deli	efektivitas pengelolaan	
		Serdang	dana desa di Tanjung	
			Morawa sebuah desa	
			adalah 2015 (63,47%),	
			2016 (75,01%) dan 2017	
			(83, 60%). Faktor	
			penghinasan yang	
			dialami dalam	
			mewujudkan alokasi	
			dana desa di Tanjung	
			Morawa sebuah desa	
			adalah pemahaman	
			masyarakat terhadap	
			alokasi dana desa,	
			kehilangan komunikasi,	
			dan sumber daya	
			manusia.	

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) variabel/variabel mandiri yaitu pengawasan Pelaksanan Anggaran Dana Kampung, sehingga secara operasionalnya pengawasan dapat diberikan arti sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma dan standar. Untuk mengukur variabel Pengawasan, maka digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Waktu Pengawasan.

Waktu Pengawasan yaitu Pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan Pengawasan yang dilaksanakan pada akhir selesainya kegiatan.

b. Objek pengawasan.

Objek pengawasan yaitu pelaksanaan pengawasan baik secara administratif, dimana pengawasan dilaksanakan di bidang yang fungsinya dikategorikan sebagai tugas administratif (usaha untuk melayani, mengarahkan, dan megatur kegiatan) serta pengawasan operatif (tata usaha, perbekalan, kepegawaian, keuangan) dimana pengawasan yang dilaksanakan pada bidang yang berfungsi melaksanakan pekerjaan operasional.

c. Subjek pengawasan.

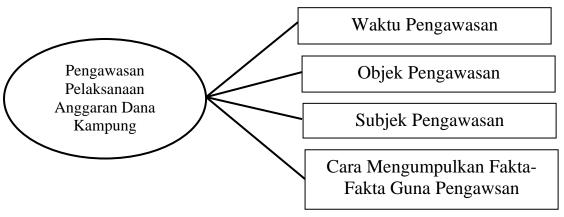
Subjek pengawasan yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secarainternal dimana yang dilakukan oleh atasan dari petugas/bawahan yang bersangkutan serta secara eksterndimana pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi.

d. Cara pengumpulkan fakta-fakta dilaksanakan melalui peninjauan pribadi,Interviu/laporan lisan, Laporan tertulis, dan Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat luar biasa.

D. Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut **Sugiyono** (2004:120) berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini, maka sebagai kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Pada gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa untuk mengukur Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Dana Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Lanny Jaya, maka dibuatkan indikator penilaiannya yaitu: waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan dan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Lanny Jaya. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan dapat menghemat tenaga, waktu serta memudahkan dalam pengumpulan data.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penulisan ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh **Sugiyono** (2011:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut **Sugiyono** (2009:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya sedangkan menurut **Suharsimi Arikunto** (2006:130) Populasi adalah Keseluruhan Objek Penelitian. Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Kampung Pada

Kantor Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Lanny Jaya yang berjumlah 13 orang.

2. Sampel

Sampel menurut **Sugiyono** (2009:91), mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling Jenuh menurut **Sugiyono** (2009:96), adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yaitu berjumlah **13 orang** yang terdiri dari :

➤ Kepala Kampung : 1 orang
 ➤ Sekretaris : 1 orang
 ➤ Kepala Seksi Pemerintahan : 1 orang

➤ Kepala Seksi Kesejahteraan : 1 orang➤ Kepala Urusan TU dan Umum : 1 orang

➤ Kepala Urusan Perencanaan : 1 orang➤ BMK : 7 orang

Jumlah : 13 orang

dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah **13 orang**

D. Instrumen Penelitian

Variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi indikator variabel yang selanjutnya akan digunakan sebagai titik tolak dalam menyusun pertanyaan. Skala yang digunakan menggunakan ordinal dengan pengukuran likert. Saat ini memiliki 4 skala poin dengan kategori jawaban yaitu "setuju", "kurang setuju", "tidak setuju", "sangat tidak setuju". Pada penelitian ini, peneliti

memilih skala likert dengan 4 skala poin, yakni pernyataan mengenai tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang disampaikan. Penggunaan skala likert ini digunakan peneliti untuk menghindari jawaban ragu-ragu dari para responden. Penilaian kecenderungan responden dilihat pada kecondongan jumlah jawaban lebih mengarah pada kisaran derajat kesetujuan yang telah ditentukan yaitu titik kesetujuan dan ketidaksetujuan sebagaimana yang telah disediakan oleh skala Likert (Cooper et all, 2001:136).

1. Sangat Setuju	Skor 4
2. Setuju	Skor 3
3. Kurang Setuju	Skor 2
4. Tidak Setuju	Skor 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Penelitian pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku buku literatur, diktat—diktat, bahan kuliah, Peraturan-Peraturan, Undang-Undang dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini.

2. Observasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat atau peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

3. Kuesioner

Menurut **Sugiyono** (2006:162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik utama pengumpulan data dalam penelitian untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung di Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Lanny Jaya.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu dengan menggunakan analisa skor. Mengingat ada 4 kategori skor maka dapat dikelompokkan dalam 4 kelas interval.

Menurut Hasan (2006:24), teknik analisa data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Berikut ini merupakan rentang kelas interval dari jawaban responden:

Jumlah skor ideal (skor maksimum) = 4 X Jumlah Responden

= 4 X 13

= 52

Jumlah skor terendah (skor minimum) = 1 X Jumlah Responden

 $= 1 \times 13$

= 13

Berdasarkan nilai skor terendah (skor minimum) 13 dan skor ideal (skor maksimum) 52 maka di interpretasi kedalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Interprestasi Nilai

No	Interval Jumlah Skor	Predikat	
1	$39 < \text{jumlah skor} \le 52$	Sangat Setuju	
2	26< jumlah skor ≤ 39	Setuju	
3	13< jumlah skor ≤ 26	Kurang Setuju	
4	1< jumlah skor ≤ 13	Tidak Setuju	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Handoko, T Hani, 2003. Manajemen Edisi II. BPFE, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan, Syafri, 2001, Sistem Kepegawaian Manajemen, Pustaka Kuantum, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Cetakan ke Lima, Bumi Aksara, Jakarta.
- Herujito, Yayat M. 2001, Dasar-Dasar Manajemen, Grasindo, Jakarta.
- Manullang, M. 2002, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. J.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Karya, Bandung.
- Nannan, Bargir, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UI, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Karya, Bandung
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramana, Dian. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser." Ilmu Pemerintahan 1. 4 (April 2016): 1501-1512. 13 November 2016. http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Siagian, Sondang P. 2004. Fungsi-fungsi Manajerial. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- Simbolon, Marigan, Masry, 2004. *Dasar-dasar Administrasi Manajemen*, Galilea Indonesia, Jakarta.
- Suprihanto, J, 2003. Statiska dan Sistem Informasi Untuk Pimpinan, Erlangga, Jakarta.

B. Dokumen:

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang- undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 (OTODA 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kampung Timi Distrik Wareka

Kampung Timi terletak di Distrik Wereka. Distrik Wereka merupakan salah satu distrik yang berada di Kabupaten Lanny Jaya dengan luas sebesar 175,89 Km². Distrik Wereka Memiliki sembilan kampung di Distrik Wereka antara lain Kampung Timi, Kampung Ponalo, Kampung Tiwa, Kampung Tabukeker, Kampung Luramara, Kampung Pelek, Kampung Beyongwi, Kampung Uragi, Kampung Digu.

Kampung Timi Pertama Kali Dibentuk Pada Tahun 1984 Dibawah Pimpinan Gerien Gire, Dan Sekaligus Menjabat Sebagai Kepala Kampung Timi

Beliau menjabat dalam enam periode dari tahun 1913 sampai tahun 2017 di ganti Paribo Gire dari tahun 2017 sampai tahun 2020 diganti Tuwe Penggu dari tahun 2020 sampai saat ini

2. Letak Kampung Timi Distrik Wareka

Kampung Timi berada di wilayah Distrik Wereka mempunyai luas wilayah 124,82 Km². Dengan penggunaan lahan sebagai tanah pemukiman dan tanah pertanian.

Jarak dan akses dari Kampung Timi menuju ibu kota kabupaten adalah ±8,7 Km dan jarak dari Kampung Timi menuju ibu kota distrik adalah ±2 Km yang dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat baik roda dua maupun roda empat.

Batas wilayah administratif Kampung Timi adalah sebagai berikut:

1) Bagian timur berbatasan dengan Kampung Ponalo Distrik Tiomneri

- 2) Bagian barat berbatasan dengan Kampung Gumbanalo Distrik Tiom Olo
- Bagian utara berbatasan dengan Kampung Dingu Distrik Melagai
 Neri
- 4) Bagian selatan berbatasan dengan Kampung Oji Distrik Yugingi

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kampung Timi Distrik Wereka sebanyak 382 KK dari 1.113 jiwa yang tersebar di tujuh dusun yang ada di Kampung Timi Distrik Wereka. Jumlah penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah penduduk kampung Timi distrik wereka

	buman penduduk kampung 1 mm distrik wereka				
No	Nama Dusun	Jenisl	Jumlah		
NO	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Juilliali	
1.	Laukama	83	69	152	
2.	Guka	65	150	215	
3.	Gukaneri	98	93	191	
4.	Lambuwi	76	13	160	
5.	Biru	81	30	111	
6.	Gonam	54	103	157	
7.	Bigiragi	86	41	127	
	Jumlah	543	570	1.113	

Sumber Data: Kantor Kampung Timi Distrik Wereka, 2022

4. Susunan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi Distrik

Struktur organisasi Pemerintahan Kampung Timi Distrik Wareka mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Distrik dan Kampung/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Susunan organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kampung, terdiri atas :
 - 1) Kepala Kampung
 - 2) Sekretaris Kampung
 - 3) Badan Musyawarah Kampung

- b. Kampung Timi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kampung, terdiri dari :
 - 1) Sekretariat Kampung
 - 2) Kepala Seksi Pemerintahan
 - 3) Kepala Seksi Kesejahteraan
 - 4) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 - 5) Kepala Urusan Perencanaan

Susunan organisasi Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Lanny Jaya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi Kampung Timi sebagai berikut :

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Lanny Jaya



Sumber data: Kantor Kampung Timi, Tahun 2022

a. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala kampung

Tugas dan fungsi kepala kampung adalah:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah kampung
- b) Membina kehidupan masyarakat kampung

- c) Membina perekonomian kampung
- d) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung
 - f) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat mewujudkan kuasa hukumnya.

Dalam pelaksanaan tugas kepala kampung di bantu oleh sekretaris kampung.

2) Sekretaris kampung

Tugas dan fungsi sekretaris kampung

- Adapun tugas sekretaris kampung mempunyai tugas antara lain :
 - a) Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung.
 - b) Memberikan pelayanan administrasi kepada kampung.
- 2) Fungsi sekretaris kampung adalah :
 - a) Melaksanakan urusan surat menyurat
 - b) Kearsipan dan laporan
 - c) Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan
 - d) Melaksanakan tugas dan fungsi dari kepala kampung apabila kepala kampung berhalangan melakukan tugasnya.
- 3) Kepala Seksi pemerintahan

Tugas Kasi pemerintahan yaitu:

- a) Mencatat administrasi penduduk
- b) Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal surat pengantar pembuatan KTP dan lain – lain surat yang di perlukan.
- c) Mencatat administrasi pertanahan.
- d) Mencatat kegiatan kemasyarakatan pada RT/RW.

- e) Mencatat peraturan kampung dan keputusan kepala kampung setelah mendapat persetujuan dari BMK.
- f) Menyusun rencana keuangan.
- g) Melaksanakan administrasi pemilu.
- h) Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala kampung atau sekretaris kampung.

4) Kapala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Kasi Kesejahteraan rakyat yaitu:

- a) Mencatat tingkat kesejahteraan rakyat masyarakat kampung termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian dan olahraga, pemuda, pramuka dan lain – lain.
- b) Menginvestasikan penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan bekas narapidana.
- Mencatat data warga yang nikah, latak, cerai dan rujuk.
 Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala kampung atau sekretaris kampung.

5) Kepala Urusan TU dan Umum

Tugas Kaur TU dan Umum yaitu:

- a) Mencatat, menerima dan mengembalikan surat surat masuk dan keluar serta menata kearsipan.
- b) Menyediakan, menyimpan dan mendistribusikan alat tulis kantor pada masing – masing kaur serta memelihara / perbaikan alat kantor.
- c) Mengkoordinir ketertiban dan kebersihan di lingkungan kantor dan pembangunan lainnya milik kampung.
- d) Menginvestasikan semua kekayaan kantor.
- e) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu.

Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala kampung atau sekretaris kampung.

6) Kepala Urusan Perencanaan

Tugas Kaur pembangunan yaitu:

- a) Mencatat kegiatan administrasi pembangunan
- b) Mencatat hasil swadaya / partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan
- c) Mencatat data potensial dan kekayaan kampung
- d) Mempersiapkan bahan daftar usulan rencana proyek / keuangan
- e) Mencatat mengenai permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain lain
- f) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala kampung atau sekretaris kampung.

5. Keadaan Responden

Jumlah responden sebanyak 13 orang, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya untuk diketahui keadaan dan jumlah responden dilihat dari, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan masa kerja sebagai berikut:

1. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase
1	LAKI-LAKI	11	84,62%
2	PEREMPUAN	2	15,38%
JUMLAH		13	100%

Sumber: Hasil Olah Data, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh suatu gambaran bahwa keadaan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang atau 84,62% dan perempuan sebanyak 2 orang atau 15,28%

2. Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Untuk mengetahui keadaan responden berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Umur

N0	Tingkat umur	Frekuensi (Orang)	Persentase			
1	30 - 35	5	38,46%			
2	36 - 40	5	38,46%			
3	41 - 50	3	23,8%			
4	51 ≤	0	0%			
	Jumlah	13	100%			

Sumber: Hasil Olah Data, Tahun 2022

Dari data tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa komposisi umur responden antara 30 sampai dengan 35 tahun berjumlah 5 orang atau 38,46%, 5 orang atau 38,46% berusia antara 36 sampai dengan 40 tahun, 3 orang atau 23,8% berusia antara 41 sampai dengan 50 tahun.

3. Keadaan responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan Responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase
1	SD	6	46,15%
2	SMP	5	38,46%
3	SMA	2	15,38%
	Jumlah	13	100%

Sumber: Hasil Olah Data, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, pendidikan formal yang dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai pada Sekolah lanjutan tingkat atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

responden yang terbanyak adalah SD yaitu sebanyak 6 orang atau 64,15%, responden dengan tingkat pendidikan SMP 5 orang atau 38,46%, dan responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 orang atau 15,38%.

4. Keadaan Responden Berdasarkan Pekerjaan.

Keadaan reponden berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Keadaan Responden berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Persentase
1	Aparat Kampung	6	46,15%
2	BMK	7	53,85%
	Jumlah	13	100%

Sumber: Hasil Olah Data, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa keadaan responden berdasarkan pekerjaan terdiri dari Aparat Kampung sebanyak 6 orang atau 46,15% dan BMK sebanyak 7 orang atau 53,85%.

5. Keadaan Responden Berdasarkan Masa Kerja.

Keadaan reponden berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Keadaan Responden berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Frekuensi (Orang)	Persentase
1	1 - 2 Tahun	2	15,38%
2	3 – 4 Tahun	9	69,23%
3	5 Tahun Keatas	2	15,38%
	Jumlah	13	100%

Sumber: Hasil Olah Data, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa keadaan responden berdasarkan masa kerja yaitu responden dengan masa kerja antara 1-2 Tahun sebanyak 2 orang atau 15,38%,

responden dengan masa kerja 3-4 tahun sebanyak 9 orang atau 69,23% dan responden dengan masa kerja 5 tahun keatas sebanyak 2 orang atau 15,385%.

B. Analisa Data

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya, maka peneliti menggunakan indikator yaitu waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan dan cara pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Waktu Pengawasan

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam dengan indiator Dana Desa Pelaksanaan Anggaran waktu pengawasan dengan sub indikator Badan Musyawarah Kampung pelaksanaan pemantauan secara langsung melakukan pada pengelolaan Dana Kampung, Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan tidak secara langsung melalui laporan dari pemerintah Kampung yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dan Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Kampung oleh Badan Musyawarah Kampung, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Tentang
Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan secara langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	2	8
2	Setuju	3	6	18
3	Kurang Setuju	2	2	4
4	Tidak Setuju	1	3	3
	Jumlah	13	33	

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas terlihat bahwa dari 13 responden sebanyak 2 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 8, 6 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 18, 2 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 4, dan 3 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 3 tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan secara langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.6 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 33. Dengan demikian tanggapan responden tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan secara langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung yaitu 33 dan masuk pada predikat setuju.

.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Tentang
Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan tidak
secara langsung melalui laporan dari pemerintah Kampung yang
bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana
Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	2	8
2	Setuju	3	6	18
3	Kurang Setuju	2	4	8
4	Tidak Setuju	1	1	1
	Jumlah	13	35	

Berdasarkan table 4.7 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 2 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 8, 6 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 18, 4 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 8, dan 1 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 1 tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan tidak secara langsung melalui laporan dari pemerintah Kampung yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.7 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 35. Dengan demikian tanggapan responden tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan tidak secara langsung melalui laporan dari pemerintah Kampung yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung yaitu 35 dan masuk pada predikat setuju.

.

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Tentang Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Kampung oleh Badan Musyawarah Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	2	8
2	Setuju	3	4	12
3	Kurang Setuju	2	5	10
4	Tidak Setuju	1	2	2
	Jumlah	13	32	

Berdasarkan table 4.8 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 2 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 8, 4 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 12, 5 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 10, dan 2 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 2 tentang Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Kampung oleh Badan Musyawarah Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.8 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 32. Dengan demikian tanggapan responden tentang Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Kampung oleh Badan Musyawarah Kampung yaitu 32 dan masuk pada predikat setuju.

2. Indikator Objek Pengawasan

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa dengan indiator objek pengawasan dengan sub indikator Anggota Badan Musyawarah Kampung melakukan cross check antara hasil laporan dengan pengamatan langsung ke objek pelaksana kegiatan, Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara dengan Pemerintah Kampung mengenai pengelolaan Dana Kampung dan Badan

Musyawarah Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Tentang
Anggota Badan Musyawarah Kampung melakukan cross check
antara hasil laporan dengan pengamatan langsung
ke objek pelaksana kegiatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	1	4
2	Setuju	3	5	15
3	Kurang Setuju	2	5	10
4	Tidak Setuju	1	2	2
	Jumlah	13	31	

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 1 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 4, 5 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 15, 5 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 10, dan 2 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 2 tentang Anggota Badan Musyawarah Kampung melakukan cross check antara hasil laporan dengan pengamatan langsung ke objek pelaksana kegiatan.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.9 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 31 Dengan demikian tanggapan responden tentang Anggota Badan Musyawarah Kampung melakukan cross check antara hasil laporan dengan pengamatan langsung ke objek pelaksana kegiatan yaitu 31 dan masuk pada predikat setuju.

.

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Tentang
Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara dengan
Pemerintah Kampung mengenai pengelolaan Dana Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor	
1	Sangat Setuju	4	6	24	
2	Setuju	3	3	9	
3	Kurang Setuju	2	1	2	
4	Tidak Setuju	1	3	3	
	Jumlah	13	38		

Berdasarkan tabel 4.10 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 6 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 24, 3 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 9, 1 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 2, dan 3 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 3 tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara dengan Pemerintah Kampung mengenai pengelolaan Dana Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.10 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 38. Dengan demikian tanggapan responden tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara dengan Pemerintah Kampung mengenai pengelolaan Dana Kampung yaitu 38 dan masuk pada predikat setuju.

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Tentang Badan Musyawarah
Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana
Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

	Nebutunun musyurunut					
No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor		
1	Sangat Setuju	4	2	8		
2	Setuju	3	4	12		
3	Kurang Setuju	2	3	6		
4	Tidak Setuju	1	4	4		
	Jumlah	13	30			

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 2 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 8, 4 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 12, 3 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 6, dan 4 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor4 tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.11 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 30. Dengan demikian tanggapan responden tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu 30 dan masuk pada predikat setuju.

3. Indikator Subjek Pengawasan

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Dana Desa indiator Pelaksanaan Anggaran dengan subjek pengawasan dengan sub indikator Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dari pemerintah Kampung kepada Badan Musyawarah Kampung, Anggota Badan Musyawarah Kampung mempunyai kecermatan dalam mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana Kampung, Anggota Badan Musyawarah Kampung mengamati Dana Kampung dari hasil kegiatan yang dilakukan dan Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BMK membuat kinerja Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Tentang
Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana
Kampung dari pemerintah Kampung kepada Badan
Musyawarah Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	1	4
2	Setuju	3	6	18
3	Kurang Setuju	2	4	8
4	Tidak Setuju	1	2	2
	Jumlah	13	32	

Berdasarkan tabel 4.12 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 1 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 4, 6 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 18, 4 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 8, dan 2 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 2 tentang Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dari pemerintah Kampung kepada Badan Musyawarah Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.12 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 32. Dengan demikian tanggapan responden tentang Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dari pemerintah Kampung kepada Badan Musyawarah Kampung yaitu 32 dan masuk pada predikat setuju.

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Tentang Anggota Badan Musyawarah
Kampung mempunyai kecermatan dalam mengamati
informasi dan data tentang pengelolaan Dana Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	1	4
2	Setuju	3	6	18
3	Kurang Setuju	2	3	6
4	Tidak Setuju	1	3	3
Jumlah			13	31

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 1 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 4, 6 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 18, 3 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 6, dan 3 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 3 tentang Anggota Badan Musyawarah Kampung mempunyai kecermatan dalam mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.13 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 31. Dengan demikian tanggapan responden tentang Anggota Badan Musyawarah Kampung mempunyai kecermatan dalam mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana Kampung yaitu 31 dan masuk pada predikat setuju.

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Tentang
Anggota Badan Musyawarah Kampung mengamati Dana
Kampung dari hasil kegiatan yang dilakukan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	1	4
2	Setuju	3	2	6
3	Kurang Setuju	2	6	12
4	Tidak Setuju	1	4	4
	Jumlah	•	13	26

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.14 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 1 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 4, 2 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 6, 6 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 12, dan 4 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 4 tentang Anggota Badan Musyawarah Kampung mengamati Dana Kampung dari hasil kegiatan yang dilakukan.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.14 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 26. Dengan demikian tanggapan responden tentang Anggota Badan Musyawarah Kampung mengamati Dana Kampung dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu 26 dan masuk pada predikat setuju.

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Tentang
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BMK membuat
kinerja Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	3	12
2	Setuju	3	2	6
3	Kurang Setuju	2	5	10
4	Tidak Setuju	1	3	3
	Jumlah	13	31	

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.15 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 3 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 12, 2 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 6, 5 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 10, dan 3 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 3 tentang Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BMK membuat kinerja Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.15 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 31. Dengan demikian tanggapan responden tentang Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BMK membuat kinerja Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal yaitu 31 dan masuk pada predikat setuju.

4. Indikator Cara Pengumpulan Fakta-Fakta

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden tentang fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa dengan indiator cara poengumpulan fakta-fakta dengan sub indikator Badan Musyawarah Kampung memberikan analisis terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporanpelaksanaan pengelolaan Dana Kampung, Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan

Dana Kampung, Badan Musyawarah Kampung menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Kampung kepada Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Kampung, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Tentang
Badan Musyawarah Kampung memberikan analisis terhadap
kebenaran atau kekeliruan dalam laporanpelaksanaan
pengelolaan Dana Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	5	20
2	Setuju	3	1	3
3	Kurang Setuju	2	4	8
4	Tidak Setuju	1	3	3
	Jumlah	13	34	

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.16 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 5 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 20, 1 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 3, 4 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 8, dan 3 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 3 tentang Badan Musyawarah Kampung memberikan analisis terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporanpelaksanaan pengelolaan Dana Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.16 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 34. Dengan demikian tanggapan responden tentang Badan Musyawarah Kampung memberikan analisis terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporanpelaksanaan pengelolaan Dana Kampung yaitu 34 dan masuk pada predikat setuju.

.

Tabel 4.17
Tanggapan Responden Tentang
Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	5	20
2	Setuju	3	4	12
3	Kurang Setuju	2	1	2
4	Tidak Setuju	1	3	3
	Jumlah	13	37	

Berdasarkan 4.17 diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 5 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 20, 4 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 12, 1 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 2, dan 3 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 3 tentang Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.17 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 37. Dengan demikian tanggapan responden tentang Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung yaitu 37 dan masuk pada predikat setuju.

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Tentang
Badan Musyawarah Kampung menyampaikan perhitungan
waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana
Kampung kepada Pemerintah Kampung

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Sangat Setuju	4	2	8
2	Setuju	3	6	18
3	Kurang Setuju	2	3	6
4	Tidak Setuju	1	2	2
	Jumlah	13	34	

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.18 data diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 2 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 8, 6 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 18, 3 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 6, dan 2 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 2 tentang Badan Musyawarah Kampung menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Kampung kepada Pemerintah Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.18 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 34. Dengan demikian tanggapan responden tentang Badan Musyawarah Kampung menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Kampung kepada Pemerintah Kampung yaitu 34 dan masuk pada predikat setuju.

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Tentang
Badan Musyawarah Kampung melakukan perhitungan
terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan
Dana Kampung

No Jawaban Frekuensi Skor Jumlah Skor Sangat Setuju 4 3 12 3 3 Setuju 3 Kurang Setuju 2 6 12 4 Tidak Setuju 1 3 3 Jumlah 13 **30**

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.19 data diatas bahwa dari 13 responden sebanyak 3 orang menjawab sangat setuju dengan jumlah skor 13, 1 orang menjawab setuju dengan jumlah skor 3, 6 orang menjawab kurang setuju dengan jumlah skor 12, dan 3 orang menjawab tidak setuju dengan jumlah skor 3 tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Kampung.

Sesuai hasil perhitungan skor pada tabel 4.19 diatas diperoleh jumlah skor sebesar 30. Dengan demikian tanggapan responden tentang Badan Musyawarah Kampung melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Kampung yaitu 30 dan masuk pada predikat setuju.

C. Pembahasan

Untuk menunjukkan data dan hasil penelitian ini maka penulis melakukan interprestasi data secara keseluruhan guna melihat bagaimana fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa, maka peneliti menggunakan indikator yaitu waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan dan cara pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan.

Berdasarkan analisis data diatas, maka indikator-indikator tersebut akan dibahas sebagai berikut :

a. Indikator Waktu Pengawasan

Dalam menganalisa variabel fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa khususnya indiator waktu pengawasan dengan sub indikator Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan secara langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung, Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan tidak secara langsung melalui laporan dari pemerintah Kampung yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dan Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Kampung oleh Badan Musyawarah Kampung.

sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang disebarkan untuk diisi oleh responden maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel 4.20 sebagai berikut :

Tabel 4.20 Rata-Rata Skor Indikator Waktu Pengawsan

Kata-Kata Skor mulkator waktu rengawsan				
No	Sub Indikator	Frekuensi	Jumlah Skor	Predikat
1	Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan secara langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung	13	33	Setuju
2	Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan tidak secara langsung melalui laporan dari pemerintah Kampung yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung	13	35	Setuju
3	Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Kampung oleh Badan Musyawarah Kampung	13	32	Setuju
Rata-rata		13	33,33	Setuju

Sumber: Hasil olah data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, Hasil analisis data menunjukkan bahwa fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa berdasarkan indikator **waktu pengawasan** dengan sub indikator Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan secara langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung memiliki skor 33 termasuk dalam predikat setuju, Badan Musyawarah Kampung melakukan pemantauan tidak secara langsung melalui laporan dari pemerintah Kampung yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung memiliki skor 35 termasuk dalam predikat setuju, dan Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik dalam pengelolaan Dana Kampung oleh Badan

Musyawarah Kampung memiliki skor 32 termasuk dalam predikat setuju.

Dari tiga sub indikator pengukuran pada indikator **waktu pengawasan**, menunjukkan nilai skor rata-rata **33,33** dimana masuk dalam predikat **Setuju**.

b. Indikator Objek Pengawasan

Dalam menganalisa variabel fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa khususnya indiator objek pengawasan dengan sub indikator Anggota Badan Musyawarah Kampung melakukan cross check antara hasil laporan dengan pengamatan langsung ke objek pelaksana kegiatan, Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara dengan Pemerintah Kampung mengenai pengelolaan Dana Kampung dan Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang disebarkan untuk diisi oleh responden maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel 4.21 sebagai berikut :

Tabel 4.21 Rata-Rata Skor Indikator Objek Pengawsan

	Rata-Rata Skor Indikator Objek Pengawsan					
No	Sub Indikator	Frekuensi	Jumlah Skor	Predikat		
1	Anggota Badan Musyawarah Kampung melakukan cross check antara hasil laporan dengan pengamatan langsung ke objek pelaksana kegiatan	13	31	Setuju		
2	Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara dengan Pemerintah Kampung mengenai pengelolaan Dana Kampung	13	38	Setuju		
3	Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	13	30	Setuju		
	Rata-rata	13	33	Setuju		

Sumber: Hasil olah data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.21 diatas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa berdasarkan indikator objek pengawasan dengan sub indikator Anggota Badan Musyawarah Kampung melakukan cross check antara hasil laporan dengan pengamatan langsung ke objek pelaksana kegiatan memiliki skor 31 termasuk dalam predikat setuju, Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara dengan Pemerintah Kampung mengenai pengelolaan Dana Kampung memiliki skor 38 termasuk dalam predikat setuju, dan Badan Musyawarah Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai

dengan kebutuhan masyarakat memiliki skor 30 termasuk dalam predikat setuju.

Dari tiga sub indikator pengukuran pada indikator **waktu pengawasan**, menunjukkan nilai skor rata-rata **33** dimana masuk dalam predikat **Setuju**.

c. Indikator Subjek Pengawasan

Dalam menganalisa variabel fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa khususnya indiator subjek pengawasan dengan sub indikator Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dari pemerintah Kampung kepada Badan Musyawarah Kampung, Anggota Badan Musyawarah Kampung mempunyai dalam mengamati informasi dan data kecermatan tentang pengelolaan Dana Kampung, Anggota Badan Musyawarah Kampung mengamati Dana Kampung dari hasil kegiatan yang dilakukan dan Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BMK membuat kinerja Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal.

sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang disebarkan untuk diisi oleh responden maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel 4.22 sebagai berikut :

Tabel 4.22 Rata-Rata Skor Indikator Subjek Pengawsan

	Rata-Rata Skor Indikator Subjek Pengawsan					
No	Sub Indikator	Frekuensi	Jumlah Skor	Predikat		
1	Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dari pemerintah Kampung kepada Badan Musyawarah Kampung	13	32	Setuju		
2	Anggota Badan Musyawarah Kampung mempunyai kecermatan dalam mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana Kampung	13	31	Setuju		
3	Anggota Badan Musyawarah Kampung mengamati Dana Kampung dari hasil kegiatan yang dilakukan	13	26	Setuju		
4	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BMK membuat kinerja Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal	13	31	Setuju		
	Rata-rata	13	30	Setuju		

Sumber: Hasil olah data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.22 diatas, Hasil analisis data menunjukkan bahwa fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa berdasarkan indikator **subjek pengawasan** dengan sub indikator Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dari pemerintah Kampung kepada Badan Musyawarah Kampung memiliki skor 32 termasuk dalam predikat setuju, Anggota Badan Musyawarah Kampung mempunyai kecermatan dalam mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana Kampung memiliki skor 31 termasuk dalam predikat setuju, Anggota Badan Musyawarah Kampung mengamati Dana Kampung dari hasil

kegiatan yang dilakukan memiliki skor 26 termasuk dalam predikat setuju dan Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BMK membuat kinerja Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal memiliki skor 31 termasuk dalam predikat setuju.

Dari empat sub indikator pengukuran pada indikator **subjek pengawasan**, menunjukkan nilai skor rata-rata **30** dimana masuk dalam predikat **Setuju**.

d. Indikator Cara Mengumpulkan Fakta-Fakta Guna Pengawasan

Dalam menganalisa variabel fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa khususnya indiator cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan dengan sub indikator Badan Musyawarah Kampung memberikan analisis terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung, Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung, Badan Musyawarah Kampung menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Kampung kepada Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Kampung.

sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang disebarkan untuk diisi oleh responden maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada tabel 4.23 sebagai berikut :

Tabel 4.23
Rata-Rata Skor Indikator Cara Mengumpulkan Fakta-Fakta

	Rata-Rata Skor Indikator Cara Mengumpulkan Fakta-Fakta				
No	Sub Indikator	Frekuensi	Jumlah Skor	Predikat	
1	Badan Musyawarah Kampung memberikan analisis terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung	13	34	Setuju	
2	Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung	13	37	Setuju	
3	Badan Musyawarah Kampung menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Kampung kepada Pemerintah Kampung	13	34	Setuju	
4	Badan Musyawarah Kampung melakukan perhitungan terhadap biaya- biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Kampung	13	30	Setuju	
	Rata-rata	13	33,75	Setuju	

Sumber: Hasil olah data Primer, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.23 diatas, Hasil analisis data menunjukkan bahwa fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa berdasarkan indikator **cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan** dengan sub indikator Badan Musyawarah Kampung memberikan analisis terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung memiliki skor 34 termasuk dalam predikat setuju, Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung memiliki skor 37 termasuk dalam predikat setuju, Badan Musyawarah

Kampung menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Kampung kepada Pemerintah Kampung memiliki skor 34 termasuk dalam predikat setuju dan Badan Musyawarah Kampung melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Kampung memiliki skor 30 termasuk dalam predikat setuju.

Dari empat sub indikator pengukuran pada indikator **cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan**, menunjukkan nilai skor rata-rata **33,75** dimana masuk dalam predikat **Setuju**.

Tabel 4.24 Rekapitulasi Indikator Dari Variabel Fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Di Kampung Timi Distrik Wareka

No	Indikator	Frekuensi	Rata-rata Skor	Predikat
1	Waktu Pengawasan	13	33,33	Setuju
2	Objek Pengawasan	13	33	Setuju
3	Subjek Pengawasan	13	30	Setuju
4	Cara Mengumpulkan Fakta-fakta	13	33,75	Setuju
	Rata-rata	13	32,52	Setuju

Sumber Data: Pengolahan data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata skor dari indikator Waktu Pengawasan adalah 33,33 termasuk dalam predikat setuju, rata-rata skor indikator Objek Pengawasan adalah 33 termasuk dalam predikat setuju, rata-rata skor indikator Subjek Pengawasan adalah 30 termasuk dalam predikat setuju dan rata-rata skor indikator Cara Mengumpulkan Fakta-fakta adalah 33,75 termasuk dalam predikat setuju. Dari hasil tersebut juga terlihat bahwa dari keempat indikator tersebut memiliki nilai rata-rata skor yang tidak berbeda jauh dimana indikator Cara Mengumpulkan Fakta-fakta memiliki nilai

rata-rata skor tertinggi dan indikator **Subjek Pengawasan** memiliki nilai rata-rata skor terendah.

Rata-rata skor hasil rekapitulasi dari keempat indikator pengukuran yang digunakan adalah 32,52 termasuk dalam predikat **Setuju**. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Di Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Jayawijaya berdasarkan keempat indikator pengukuran dapat dikategorikan telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil olah data penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden mengenai fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Di Kampung Timi Distrik Wareka Kabupaten Jayawijaya diperoleh hasil setuju, hal ini sesuai dengan hasil pengamatan awal penulis dimana Badan Musyawarah Kampung (BMK) telah menjalankan tugasnya sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran dana desa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang fumgsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip pengawasan yang dilakukan Badan Musyawarah Kampung (BMK) Kampung Timi lebih mengacu pada perencanaan, evaluasi kerja, serta tindakan korektif dengan cara terjun langsung ke lapangan.
- 2. Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan ADD di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya agar sesuai dengan standar dan selesai dengan tepat waktu, serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya secara optimal, dan tepat sasaran. Dalam melakaanakan fungsi pengawasan tujuan yang sudah dicapai di Kampung Timi adalah pembangunan infrastruktur.
- 3. Proses tindakan korektif yang dilakukan Badan Musyawarah Kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya dengan cara terjun langsung untuk membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.
- 4. Tanggung jawab Badan Musyawarah Kampung (BMK) dalam melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya sudah

berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang di harapkan. Walaupun masih ada tingkat kesulitan yang dihadapi yaitu kurangnya rasa ingin tahu masyarakat dalam pegawasan pengelolaan ADD.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukkan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

- 1. Diharapkan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) terus lebih ditingkatkan dan terus berjalan seperti yang diharapkan demi kemajuan masyarakat setempat.
- 2. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi penuh agar dapat berjalannya pengawasan dengan baik seerta dapat tercapai tujuan yang hendak dicapai.
- 3. Untuk tindakan korektif yang dilakukan Badan Musyawarah Kampung (BMK) harus meningkatkan tekad dan keberanian untuk melakukan Tindakan tegas dalam menindak lanjuti apabila terdapat kesalahan yang dilakukan bawahan.
- 4. Perangakat Kampung Timi harus mensosialisasikan tentang adanya Alokasi Dana Desa kepada masyarakat Kampung Timi agar masyarakat dapat mengetahui tentang adanya ADD dan fungsi ADD, dengan begitu rasa ingin tahu masyarakat pasti meningkat.

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.

I. PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang ada pada angket ini sesuai keadaan, pendapat, perasaan Bapak/Ibu, bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.

Penyataan-pernyataan dalam angket ini mempunyai 4 (empat) alternatif jawaban. Mohon diberi tanda centang (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai.

Keterangan Alternatif Jawaban:					
SS	:	Sangat Setuju			
S	:	Setuju			

KS : Kurang Setuju TS : Tidak Setuju

IDENTITAS RESPONDEN:

Nomor Responden	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:(Tahun)
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Masa Keria	:

Pernyataan Variabel Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Kampung (BMK) Dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (Add) Di Kampung Timi Distrik Wereka Kabupaten Lanny Jaya

NO	INDIKATOR	Alt	Alternatif Jawaban		
	Waktu Pengawasan	SS	S	KS	TS
1	Badan Musyawaratan Kampung melakukan				
	pemantauan secara langsung pada pelaksanaan				
	pengelolaan Dana Kampung.				
2	Badan Musyawaratan Kampung melakukan				
	pemantauan tidak secara langsung melalui laporan				
	dari pemerintah Kampung yang bertanggungjawab				
	dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung.				
3	Adanya pemeriksaan secara administrasi dan fisik				
	dalam pengelolaan Dana Kampung oleh Badan				
	Musyawaratan Kampung.				
NO	Objek Pengawasan	SS	S	KS	TS
1	Anggota Badan Musyawaratan Kampung				
	melakukan cross check antara hasil laporan dengan				
	pengamatan langsung ke objek pelaksana kegiatan.				

2	Badan Musyawaratan Kampung melakukan wawancara dengan Pemerintah Kampung mengenai				
	pengelolaan Dana Kampung				
3	Badan Musyawaratan Kampung melakukan wawancara mengenai pengelolaan Dana Kampung dengan masyarakat apakah sudah sesuai dengan				
	kebutuhan masyarakat				
NO	Subjek Pengawasan	SS	S	KS	TS
1	Adanya pemberian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung dari pemerintah Kampung kepada Badan Musyawaratan Kampung.				
2	Anggota Badan Musyawaratan Kampung mempunyai kecermatan dalam mengamati informasi dan data tentang pengelolaan Dana Kampung.				
3	Anggota Badan Musyawaratan Kampung mengamati Dana Kampung dari hasil kegiatan yang dilakukan.				
4	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BMK membuat kinerja Bapak/Ibu menjadi semakin maksimal.				
NO	Cara Pengumpulan Fakta-Fakta	SS	S	KS	TS
1	Badan Musyawaratan Kampung memberikan analisisterhadap kebenaran atau kekeliruan dalam laporanpelaksanaan pengelolaan Dana Kampung.				
2	Adanya analisis terhadap semua data hasil laporan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.				
3	Badan Musyawaratan Kampung menyampaikan perhitungan waktu yang harus ditempuh dalam pengelolaan Dana Kampung kepada Pemerintah Kampung				
4	Badan Musyawaratan Kampung melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan Dana Kampung.				

Lampiran 2. Data Responden

Liui	Lampiran 2. Data Responden							
NO	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDKAN TERAKHIR	MASA KERJA	PEKERJAAN			
1	LAKI-LAKI	36	SMA	3 tahun	KEPALA KAMPUNG			
2	LAKI-LAKI	31	SMA	3 tahun	SEKRETARIS KAMPUNG			
3	LAKI-LAKI	39	SMP	3 tahun	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN			
4	LAKI-LAKI	41	SD	3 tahun	KEPALA SEKSI TU DAN UMUM			
5	LAKI-LAKI	40	SMP	3 tahun	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN			
6	LAKI-LAKI	42	SMP	3 tahun	KEPALA SEKSI PERENCANAAN			
7	PEREMPUAN	30	SD	2 Tahun	BMK			
8	LAKI-LAKI	37	SD	5 Tahun	BMK			
9	LAKI-LAKI	50	SD	5 tahun	BMK			
10	LAKI-LAKI	32	SMP	3 Tahun	BMK			
11	LAKI-LAKI	31	SMP	2 Tahun	BMK			
12	LAKI-LAKI	34	SD	3 tahun	BMK			
13	PEREMPUAN	37	SD	3 tahun	BMK			

Lampiran 2.1 Data Hasil Penelitian

Pertanyaan 1

NO	JAWABAN RESPONDEN				
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-		-	-	
2	-		-	-	
3	-	-	√	-	
4	V	-	-	-	
5	-	-	-	V	
6	-	-		-	
7	-		-	-	
8	-		-	-	
9	-	-	-	V	
10	-		-	-	
11	$\sqrt{}$	-	-	-	
12	-	√	-	-	
13	-	-	-	V	
Jumlah	2	6	2	3	

NO		JAWABAN RESPONDEN				
RESPONDEN	SS	S	KS	TS		
1	-	V	-	-		
2	-	√	-	-		
3	-	-	√	-		
4	-	√	-	-		
5	-	-	√	-		
6	-	-	V	-		
7	-	√	-	-		
8	-	√	-	-		
9	V	-	-	-		
10	-	-	V	-		
11	-	√	-	-		
12	V	-	-	-		
13	-	-	-	V		
Jumlah	2	6	4	1		

NO	JAWABAN RESPONDEN				
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-	-	-	√	
2	-	-	V	-	
3	-	-	-	√	
4	-	V	-	-	
5	-	-	√	-	
6	-	-	√	-	
7	-	V	-	-	
8	-	√	-	-	
9	-	-	V	-	
10	V	-	-	-	
11	-	√	-	-	
12	V	-	-	-	
13	-	-	V	-	
Jumlah	2	4	5	2	

NO	J	JAWABAN RESPONDEN			
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-	-	V	-	
2	-	-	-	V	
3	-	-	V	-	
4	-	-	V	-	
5	-	√	-	-	
6	-	√	-	-	
7	-	-	V	-	
8	V	-	-	-	
9	-		-	-	
10	-	-	-	V	
11	-	-	V	-	
12	-		-	-	
13	-		-	-	
Jumlah	1	5	5	2	

NO	JAWABAN RESPONDEN				
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	V	-	-	-	
2	V	-	-	-	
3	-	-	V	-	
4	-	-	-	√	
5	$\sqrt{}$	-	-	-	
6	-	-	-	\checkmark	
7	$\sqrt{}$	-	-	-	
8	-		-	-	
9	-	-	-	\checkmark	
10	$\sqrt{}$	-	-	-	
11	-	V	-	-	
12	-	√	-	-	
13	√	-	-	-	
Jumlah	6	3	1	3	

NO	J	JAWABAN RESPONDEN			
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-	V	-	-	
2	$\sqrt{}$	-	-	-	
3	-	-	√	-	
4	-	-	-	V	
5	V	-	-	-	
6	-	-	-	√	
7	-	-	-	√	
8	-	V	-	-	
9	-	-	√	-	
10	-	-	-	V	
11	-	-	√	-	
12	-	V	-	-	
13	-	V	-	-	
Jumlah	2	4	3	4	

NO	J	AWABAN	RESPOND	EN
RESPONDEN	SS	S	KS	TS
1	-	V	-	-
2	-	V	-	-
3	-	V	-	-
4	-	-	V	-
5	-	√	-	-
6	-	-	V	-
7	-	√	-	-
8	-	-	-	V
9	-	V	-	-
10	-	-	V	-
11	-	-	-	V
12	-	-	V	-
13	V	-	-	-
Jumlah	1	6	4	2

NO	J	JAWABAN RESPONDEN			
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-	-	-	√	
2	-	-	-		
3	-	√	-	-	
4	-	-	V	-	
5	-	√	-	-	
6	-	√	-	-	
7	-	√	-	-	
8	-	-	V	-	
9	$\sqrt{}$	-	-	-	
10	-	√	-	-	
11	-	-	-		
12		-	√ V	-	
13	-		-	-	
Jumlah	1	6	3	3	

NO	JAWABAN RESPONDEN				
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-	-	-	$\sqrt{}$	
2	-	-		-	
3	-	-		-	
4	-	-	-	$\sqrt{}$	
5	-	-	-	$\sqrt{}$	
6	-		-	-	
7	$\sqrt{}$	-	-	-	
8	-	-		-	
9	-	-		-	
10	-		-	-	
11	-	-		-	
12	-	-	-		
13	-	-	√	-	
Jumlah	1	2	6	4	

NO	JA	JAWABAN RESPONDEN			
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-	-	-		
2	-	-	-	$\sqrt{}$	
3	-	-	√	-	
4	V	-	-	-	
5	-	-	√	-	
6	$\sqrt{}$	-	-	-	
7	-	-	√ V	-	
8	-	-	√ V	-	
9	-	V	-	-	
10	-	-	-	$\sqrt{}$	
11	-	-	√	-	
12	-	√ V	-	-	
13	√	-	-	-	
Jumlah	3	2	5	3	

NO	JAWABAN RESPONDEN				
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-	-		-	
2	-	-	V	-	
3	-	-	V	-	
4	-	-	-	V	
5	-	-	V	-	
6	√	-	-	-	
7	-	V	-	-	
8	$\sqrt{}$	-	-	-	
9	-	-	-	$\sqrt{}$	
10		-	-	-	
11		-	-	-	
12	√	-	-	-	
13	-	-	-		
Jumlah	5	1	4	3	

NO		AWABAN 1	RESPONDI	EN
RESPONDEN	SS	S	KS	TS
1	V	-	-	-
2	-	$\sqrt{}$	-	-
3	-	-	-	V
4	-	V	-	-
5	-	-	V	-
6	-	V	-	-
7	V	-	-	-
8	V	-	-	-
9	-	V	-	-
10	-	-	-	
11	$\sqrt{}$	-	-	-
12	V	-	-	-
13	-	-	-	V
Jumlah	5	4	1	3

NO	J	JAWABAN RESPONDEN				
RESPONDEN	SS	S	KS	TS		
1	-		-	-		
2	$\sqrt{}$	-	-	-		
3	-	-	-	V		
4	-	$\sqrt{}$	-	-		
5	-		-	-		
6	-	-	-	V		
7	-	V	-	-		
8	-	-	√	-		
9	$\sqrt{}$	-	-	-		
10	-	-	√	-		
11	-		-	-		
12	-		-	-		
13	-	-	√	-		
Jumlah	2	6	3	2		

	1 (1 (anyaan 17			
NO	JA	JAWABAN RESPONDEN			
RESPONDEN	SS	S	KS	TS	
1	-	-	V	-	
2	V	-	-	-	
3	-	-	-	V	
4	-	-	V	-	
5	-	-	-	√	
6	-	√	-	-	
7	-	-	-	√	
8	-	-		-	
9	-	-	√	-	
10	V	-	-	-	
11	-	-		-	
12	-	-	$\sqrt{}$	-	
13	V	-	-	-	
Jumlah	3	1	6	3	

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.



Foto Bersama Kepala Kampung Timi Saat Penyerahan Ijin Penelitian



Pengisian Kuesioner oleh Responden



Pengisian Kuesioner Oleh Responden

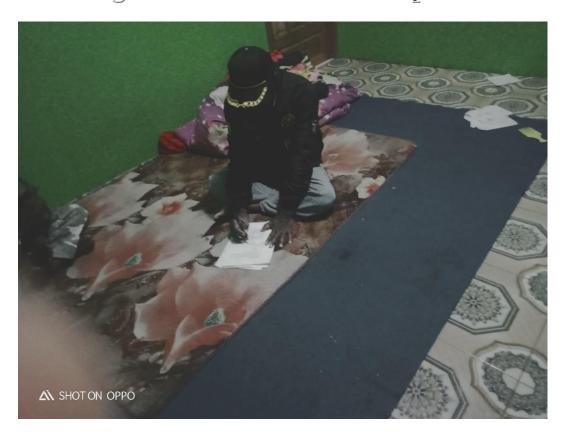


Pengisian Kuesioner Oleh Responden





Pengisian Kuesioner Oleh Responden







Pengisian Kuesioner Oleh Responden



Foto Kantor Kampung





BIODATA PENULIS



Terlin Gire, beragama Kristen Protestan, dilahirkan pada tanggal 11 November 1999 di Lambuwi, anak ke Dua dari Dua Bersaudara dari pasangan Bapak Doleki Gire dan Ibu Nerkenda Penggu. Pada tahun 2012 tamat Sekolah Dasar pada SD Inpres Milinggame, pada tahun 2015

tamat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tiomneri, dan pada tahun 2018 tamat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tiom dan diterima menjadi Mahasiswa pada Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena pada tahun akademik 2018/2019.